

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI
PERHUTANAN SOSIAL PADA KELOMPOK TANI HUTAN WONO
MULYO (Studi di Register 18 Titi Bungur, Pesawaran)**

(Skripsi)

Oleh:

NABILLA PUTRI MAHARANI

2016041035



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2024

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI PERHUTANAN SOSIAL PADA KELOMPOK TANI HUTAN WONO MULYO (Studi di Register 18 Titi Bungur, Pesawaran)

Oleh

Nabilla Putri Maharani

Program Perhutanan Sosial (PS) merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/adat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Implementasi program PS menjadi salah satu solusi dalam menyelesaikan konflik tenurial yang terjadi di kawasan Hutan Produksi Register 18 dengan memberikan akses legal kepada masyarakat agar dapat mengelola lahan di sekitar kawasan hutan dalam bentuk Kelompok Tani Hutan (KTH) dengan skema Kemitraan Kehutanan. KTH Wono Mulyo merupakan salah satu KTH yang telah mendapat persetujuan PS yang beranggotakan 48 orang dengan luas sekitar 47,70 hektare. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemberdayaan ekonomi melalui implementasi program perhutanan sosial pada KTH Wono Mulyo. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang ditinjau dengan model implementasi Smith dan indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan UNICEF. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, implementasi program PS pada KTH Wono Mulyo yang terdiri dari kebijakan yang ideal, kelompok sasaran, organisasi pelaksana, dan faktor lingkungan sudah berjalan dengan baik meskipun dalam prosesnya menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat yang mana menjadi faktor penghambat dalam pengimplementasian program PS. Kemudian, pemberdayaan ekonomi KTH jika ditinjau dengan indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi, dan kontrol masih dihadapi oleh beberapa hambatan yang mana perekonomian KTH sampai saat ini belum mengalami peningkatan dikarenakan masih berfokus pada penyelesaian konflik dan tanaman yang dikelola belum memiliki hasil karena adanya perubahan iklim dan serangan penyakit.

Kata kunci: Implementasi kebijakan, Pemberdayaan ekonomi, Perhutanan Sosial

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF A SOCIAL FORESTRY ECONOMIC EMPOWERMENT PROGRAM IN THE WONO MULYO FOREST FARMERS GROUP (Study at Register 18 Titi Bungur, Pesawaran)

By

Nabilla Putri Maharani

The Social Forestry Program (PS) is a sustainable forest management system implemented in state forest areas or private/customary forests which aims to improve community welfare. Implementation of the PS program is one solution in resolving tenurial conflicts that occur in the Register 18 Production Forest area by providing legal access to the community so they can manage land around the forest area in the form of Forest Farmer Groups (KTH) with the Forestry Partnership scheme. KTH Wono Mulyo is one of the KTHs that has received PS approval, consisting of 48 people with an area of around 47.70 hectares. This research aims to describe economic empowerment through the implementation of the social forestry program at KTH Wono Mulyo. This research uses a qualitative type with a descriptive approach which is reviewed using Smith's implementation model and indicators of success in community empowerment proposed by UNICEF. The data in this research was obtained through interviews, observation and documentation. Based on the research results obtained, the implementation of the PS program at KTH Wono Mulyo, which consists of ideal policies, target groups, implementing organizations, and environmental factors, has gone well, although in the process it has raised pros and cons from the community which has become an inhibiting factor in implementing the program PS. Then, KTH's economic empowerment, if viewed with indicators of success in community empowerment consisting of welfare, access, critical awareness, participation and control, is still faced by several obstacles in which the KTH economy has not yet experienced improvement because it is still focused on resolving conflicts and management plants has not yielded results due to climate change and disease attacks.

Keywords: Policy implementation, Economic empowerment, Social forestry

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI
PERHUTANAN SOSIAL PADA KELOMPOK TANI HUTAN WONO
MULYO (Studi di Register 18 Titi Bungur, Pesawaran)**

Oleh

NABILLA PUTRI MAHARANI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA ADMINISTRASI NEGARA

Pada

Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2024

Judul Skripsi : **Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Perhutanan Sosial Pada Kelompok Tani Hutan Wono Mulyo (Studi di Register 18 Titi Bungur, Pesawaran)**

Nama Mahasiswa : **Nabilla Putri Maharani**

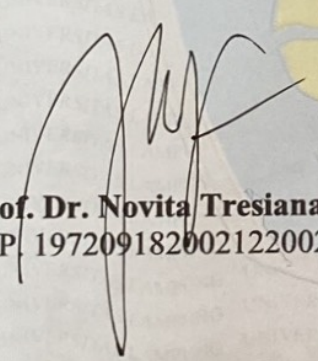
Nomor Pokok Mahasiswa : **2016041035**

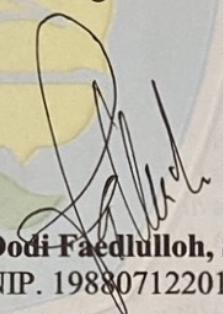
Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

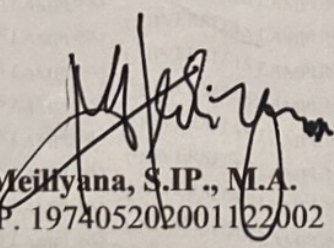
MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Prof. Dr. Novita Tresiana, S.Sos. M.Si.
NIP. 197209182002122002


Dodi Faedlulloh, S.Sos., M.Si.
NIP. 198807122019031012

2. Ketua Jurusan Administrasi Negara


Meilhyana, S.IP., M.A.
NIP. 197405202001122002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. Novita Tresiana, S.Sos., M.Si.**

Sekretaris : **Dodi Faedlulloh, S.Sos., M.Si.**

Penguji : **Dr. Bambang Utoyo S, M.Si.**

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **21 Mei 2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lainnya, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 21 Mei 2024

Saya menandatangani pernyataan,



Nabilla Putri Maharani

NPM 2016041035

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Nabilla Putri Maharani yang mana lahir di Bandar Lampung pada 20 Mei 2002. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Joni Gel dan Ibu Nurhasanah Fitri. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di TK Permata Hati Kindergarten sampai pada tahun 2006 dan dilanjutkan di TK Putri Azizah yang mana diselesaikan pada tahun 2008, setelahnya penulis melanjutkan pendidikan di SDN Arjasa 01 sampai pada tahun 2014. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan ditingkat SMP, yaitu SMPN 22 Bandar Lampung sampai dengan tahun 2017 dan kemudian melanjutkan pendidikan di SMKN 4 Bandar Lampung sampai pada tahun 2020.

Pada tahun 2020, penulis terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Penulis mengikuti beberapa organisasi selama menjadi mahasiswa, yaitu menjadi anggota dalam Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA) dan anggota *English Society* (ESo) Universitas Lampung.

Kemudian pada bulan Januari – Februari tahun 2023 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 di Desa Muara Jaya I, Kecamatan Kebun Tebu, Lampung Barat. Selanjutnya pada bulan Februari – Agustus 2023, penulis melaksanakan kegiatan Magang MBKM FISIP di Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

MOTTO

**“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya
bersama kesulitan ada kemudahan”**

(QS. Al-Insyirah 94:6-7)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT. Dzat yang Maha Sempurna.

*Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Uswatun Hasanah Rasulullah
Muhammad SAW*

*Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, Kupersembahkan karya tulis ini
sebagai tanda cinta, kasih sayang, dan terima kasihku kepada:*

Ayah dan Ibu tercinta,

*Yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan tiada hentinya. Terima
kasih banyak atas segala pengorbanan, dukungan, dan motivasi yang tak terhingga
yang selalu diberikan kepadaku sampai saat ini.*

Keluarga Besar,

*Terima kasih atas segala dukungan, motivasi, dan doa yang selalu diberikan
kepadaku selama proses perkuliahan dan penulisan skripsi ini.*

Serta,

Almamater Tercinta

UNIVERSITAS LAMPUNG

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan atas segala berkah yang telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Perhutanan Sosial Pada Kelompok Tani Hutan Wono Mulyo (Studi di Register 18 Titi Bungur, Pesawaran)**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Administrasi Negara. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, saran, dorongan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Ayah dan Ibu, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan, doa, dan dukungan yang selalu diberikan kepada penulis. Terima kasih telah menjadi orang tua yang hebat selama ini. Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan, keberkahan, dan kesehatan untuk ayah dan ibu.
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.
4. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

5. Ibu Prof. Dr. Novita Tresiana, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran, ilmu, dan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi.
6. Bapak Dodi Faedlulloh, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran, ilmu, dan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi.
7. Bapak Dr. Bambang Utoyo S, M.Si. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan ilmu, arahan, saran, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan, waktu, dan ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan.
9. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat berguna kedepannya bagi penulis.
10. Seluruh staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Terima kasih atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi.
11. Seluruh informan penelitian dan pihak yang membantu, PT. Inhutani V, KTH Wono Mulyo, KPH Pesawaran, dan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung yang telah membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini, terima kasih banyak Bapak/Ibu atas waktu dan ilmunya.
12. (Alm) Nenek. Terima kasih atas dukungan, doa, dan semangat yang diberikan selama proses perkuliahan penulis.
13. Adikku, Adinda Bunga Maharani. Terima kasih atas bantuan dan *support* yang telah diberikan. Semoga selalu dipermudah apapun yang akan dilakukan kedepannya.
14. Keluarga besar penulis. Terima kasih atas doa, *support*, bantuan, dan kasih sayang yang sudah diberikan kepada penulis selama ini.

15. Kak Rifqi Fauzi Fajari, terima kasih atas motivasi, *support*, doa, dan bantuannya yang selalu diberikan kepada penulis. Terima kasih juga sudah selalu membantu dan menemani penulis selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
16. Member Anak Sholehah, Atika, Denti, Resta, Esa, Risma, dan Riska sahabat seperjuanganku pada masa perkuliahan. Terima kasih atas segala *support*, bantuan, doa, dan canda tawa selama proses perkuliahan sampai saat ini.
17. Teman SMK-ku, Cut, Rifda, Esti, Dina, Salsa, dan Triyanah. Terima kasih atas doa dan *supportnya* yang telah diberikan kepada penulis.
18. Teman KKN-ku, KKN Muara Jaya I. Terima kasih atas *support* dan kebersamaannya.
19. Teman-teman kelas Reguler A dan angkatan 2020 (ADAMANTIA), terima kasih untuk setiap momen kebersamaan, *support*, dan bantuannya selama perkuliahan.
20. Untuk diriku sendiri, terima kasih telah berjuang sampai saat ini. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih sudah terus berusaha dan tidak menyerah, meskipun prosesnya mungkin lebih lambat dan banyak rintangan dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih sudah berjuang.
21. Untuk semua pihak yang belum disebutkan yang sudah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih banyak atas bantuannya.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
 1. PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
 II. TINJAUAN PUSTAKA.....	 7
2.1 Penelitian Terdahulu	7
2.2 Implementasi Kebijakan Publik	10
2.2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan	10
2.2.2 Model Implementasi Kebijakan	11
2.3 Pemberdayaan Ekonomi	16
2.3.1 Pengertian Pemberdayaan Ekonomi	16
2.3.2 Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat.....	17
2.4 Perhutanan Sosial	18
2.5 Kerangka Pikir	19
 III. METODE PENELITIAN.....	 21
3.1 Jenis Penelitian.....	21
3.2 Fokus Penelitian	21

3.3 Lokasi Penelitian.....	23
3.4 Waktu Penelitian	23
3.5 Sumber Data.....	24
3.6 Teknik Pengumpulan Data	24
3.7 Teknik Analisis Data.....	26
3.8 Teknik Keabsahan Data	27
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	29
4.1 Gambaran Umum.....	29
4.1.1 Profil Kawasan Kabupaten Pesawaran.....	29
4.1.2 Profil Kawasan Register 18 Titi Bungur	30
4.2 Hasil Penelitian	31
4.3 Pembahasan.....	68
V. KESIMPULAN DAN SARAN	87
5.1 Kesimpulan	87
5.2 Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN.....	94

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penelitian Terdahulu	7
2. Jadwal Penelitian.....	23
3. Daftar Informan.....	25
5. Daftar Dokumentasi	26
6. Kondisi Hutan Kawasan Register 18	31
7. Nama Kelompok Tani Hutan di Register 18.....	39
8. Peran <i>Stakeholder</i> dalam Program PS	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir	20
2. Peta Administrasi Kabupaten Pesawaran.....	30
3. Alur Perhutanan Sosial Skema Kemitraan Kehutanan.....	33
4. Tahapan Persetujuan Kemitraan Kehutanan (KK).....	34
5. Kegiatan PT. Inhutani V di Register 18	36
6. Mitra PS Skema Kemitraan Kehutanan	38
7. Daftar Anggota KTH Wono Mulyo	41
8. Dialog dan Kunjungan <i>Stakeholder</i> di Register 18.....	42
9. Salah Satu Tanaman di Lahan Garapan Petani	43
10. Pelatihan Budidaya Tanaman Alpukat.....	47
11. Kondisi lahan di Kawasan Register 18	48
12. Tanaman Alpukat yang Berumur 2 Tahun di Lahan Garapan Bapak Agus Riyanto	50
13. Faktor Penghambat Peningkatan Perekonomian KTH Wono Mulyo	52
14. Tanaman Tumpang Sari KTH Wono Mulyo	53
15. Infografis Konflik Tenurial di Register 18.....	55
16. Bentuk Usaha Peningkatan Kesadaran Petani.....	59
17. Berita Acara Pengukuran Areal Garapan KTH Wono Mulyo	63
18. Diagram Bagi Hasil Antara PT. Inhutani V dengan KTH Wono Mulyo.....	66
19. Skema Model Konseptual Penelitian	69

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wilayah atas hutan merupakan sebuah wujud dari hegemoni (kekuasaan) yang negara lakukan untuk menguasai hutan. Kekuasaan negara terhadap hutan dilindungi dengan rangkaian produk hukum yang ada sejak era sebelum kolonial, saat penjajahan, dan setelah kemerdekaan, dapat ditelaah satu ideologi penguasaan hutan yang mana bersifat hegemoni, yaitu ideologi Domainverklaring. Ideologi tersebut merupakan pernyataan pada masa Belanda yang mengatakan bahwa barang siapa yang tidak mempunyai tanah atas hak yang mutlak, maka tanah itu akan menjadi hak negara.

Ideologi Domainverklaring menjadi ideologi yang dominan sejak tahun 1870. Ideologi yang dominan tersebut selalu diadopsi oleh negara yang mana menyerahkan pernyataan yang sah mengenai penguasaan hutan yang begitu kuat yang mana untuk menahan akses masyarakat kepada hutan. Sampai saat ini, rimbawan masih beranggapan bahwa hutan harus diawasi oleh negara, hal ini dapat dilihat dari peran rimbawan dalam proses pembentukan UU Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 yang mana tetap mempertahankan pola penguasaan hutan melalui pengawasan yang penuh oleh negara. Dominasi atas hutan yang dilakukan oleh negara sejak zaman kolonial menyebabkan berbagai hak penduduk desa atas hutan semakin dibatasi (Budiono, R., dkk., 2018).

Bertambahnya penduduk dari tahun ke tahun menyebabkan adanya tekanan masyarakat dan ketergantungan terhadap kawasan hutan menjadi meningkat. Hal ini membuat masyarakat menggarap lahan yang ada dalam kawasan hutan secara ilegal.

Klaim terhadap lahan yang digarap sebagai tanah warisan juga menjadi salah satu alasan dalam memanfaatkan kawasan hutan. Tindakan yang dilakukan tersebut dapat menimbulkan konflik dalam pengelolaan kawasan hutan ketidakpastian status lahan juga menimpa institusi yang mempunyai izin usaha kehutanan.

Pengelolaan kawasan hutan sampai saat ini masih menghadapi beberapa permasalahan. Pertama, konflik tenurial di kawasan hutan. Konflik tenurial atau penguasaan lahan hutan sering terjadi akibat ketidakjelasan status kawasan hutan dan adanya tumpang tindih perizinan. Konflik tenurial terjadi karena adanya benturan dalam penguasaan lahan dan sumber daya yang ada di kawasan hutan, seperti konflik antar pengelola hutan dengan masyarakat yang menggunakan kawasan hutan untuk kebun, areal pemukiman, dll. Konflik tenurial diwujudkan sebagai sesuatu yang terjadi akibat pemerintah yang mana menjadi pemegang kekuasaan mendominasi, sehingga menimbulkan pertentangan masyarakat (Senoaji, G., & dkk, 2019). Hal ini mengakibatkan munculnya konflik yang berkepanjangan. Kedua, adanya kesenjangan ekonomi yang muncul pada masyarakat yang menetap di sekitar kawasan hutan.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, pemerintah sejak tahun 2015 mengeluarkan program Perhutanan Sosial (PS). Dengan dibentuknya program PS ini diharapkan akan mendorong pengelolaan kehutanan secara berkelanjutan, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi konflik lahan yang terjadi di kawasan hutan. Perhutanan Sosial merupakan sebuah program pengelolaan hutan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui pemberian izin akses kelola di kawasan hutan. Program ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk bisa mengelola lahan di kawasan hutan dengan tetap berpegang teguh pada aspek kelestarian yang tujuannya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dibukanya peluang bagi masyarakat yang menetap di sekitar kawasan hutan untuk dapat mengusulkan hak untuk mengelola lahan di kawasan hutan kepada pemerintah yang mana jika disepakati maka masyarakat bisa mengelola dan mengambil berbagai manfaat yang berasal dari hutan dengan gaya yang tidak merusak lingkungan.

Dengan demikian, masyarakat nantinya memperoleh berbagai tambahan penghasilan yang dapat berbentuk bantuan teknis yang diberikan pemerintah dalam mengurus tanaman perkebunan maupun pertanian di area yang diajukan. Hasil panen dari proses penanaman yang dilakukan ini nantinya dapat dijual dan dipasarkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.

Terdapat alasan utama dalam perluasan skema perhutanan sosial yaitu peluang ekonomi yang dihasilkan dari penerapan skema ini. Implementasi perhutanan sosial memberikan pendapatan bagi masyarakat yang terlibat. Selain itu, perhutanan sosial juga dapat meningkatkan kesejahteraan serta mampu mengurangi ketergantungan terhadap hutan (Rakatama, A. & Pandit, R., 2020). Diterangkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) program PS memberi dampak ekonomi yang luar biasa yang mana transaksinya mencapai ratusan miliar. Pada tahun 2022, nilai transaksi ekonomi yang dihasilkan dari perhutanan sosial mencapai angka Rp 118,69 miliar. Nilai transaksi ini menjadikan bukti yang nyata bahwa program PS dapat memberikan pengaruh yang positif bagi perekonomian masyarakat. Terdapat tiga provinsi di Indonesia yang memiliki nilai tukar ekonomi tertinggi yaitu Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, dan Lampung (Futhuhin, A. A dalam <https://rm.id/amp/baca-berita/government-action/157547/perhutanan-sosial-mampu-dongkrak-ekonomi-warga> Diakses 2 Oktober 2023).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Susilo, Y. S & Nairobi (2019), perhutanan sosial memiliki dampak yang positif dalam peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat. Selain itu, menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Puspitasari, S. A. dkk (2020), program PS juga memberikan berbagai bantuan terhadap pemberdayaan masyarakat yaitu diantaranya meningkatnya modal finansial, fisik, kelembagaan, SDM, serta pengelolaan SDA melalui perhutanan sosial.

Di Provinsi Lampung sendiri telah tercatat sekitar 332 izin program perhutanan sosial sampai pada tahun 2022 lalu. 332 izin tersebut terdiri dari lima skema perhutanan sosial diantaranya terdapat 22 izin Hutan Desa (HD), 199 izin Hutan Kemasyarakatan

(HKm), 13 izin Hutan Tanaman Rakyat (HTR), 81 izin Kemitraan Kehutanan (KK), dan 17 izin Kemitraan Konservasi (Oktaria, A dalam <https://m.lampost.co/berita-8-000-hektare-hutan-di-lampung-diajukan-jadi-perhutanan-sosial.html> Diakses 15 September 2023).

Selain pemberian izin kelola lahan di kawasan hutan, dilakukan pendampingan untuk berbagai program lanjutan guna mendukung meningkatnya ekonomi masyarakat yang ada di sekitar kawasan hutan. Pendampingan dilakukan agar masyarakat mempunyai wawasan yang baik dalam *me-manage* pemberian izin melalui Surat Keputusan (SK) yang diberikan. Pendampingan yang diberikan dapat berupa pelatihan, memfasilitasi penyusunan dan pembentukan kelembagaan, dll. Dengan dilakukannya pendampingan ini, diharapkan masyarakat yang ada di sekitar kawasan hutan diberdayakan dalam segi ekonominya.

Pengelolaan hutan oleh masyarakat dapat digabungkan dengan berbagai pola seperti *agroforestry*, *agrosilvopastura*, *agrosilvofishery*, dll yang mana keberadaan hutan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Berbagai pola ini dapat dilakukan agar menghasilkan berbagai manfaat salah satunya hasil dari pola tersebut dapat dijadikan aset mendatang yang dapat dinikmati sebagai Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). HHBK yang telah panen dapat diproduksi dan dipasarkan. Masyarakat juga dapat berinovasi dengan berbagai HHBK yang ada menjadi sebuah produk yang memiliki nilai jual yang tinggi sehingga dapat meningkatkan pendapatan ekonominya.

Dengan adanya implementasi program perhutanan sosial, masyarakat maupun petani hutan mendapatkan izin mengelola lahan di kawasan hutan dengan tetap melindungi kelestarian hutan. Perhutanan sosial juga dapat membantu masyarakat meningkatkan kesejahterannya dengan tetap menggarap lahan dan menanam tanaman Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) seperti, jagung, alpukat, lada, durian, pala, dll.

Pengelolaan hutan dalam PS dapat diberikan secara perseorangan, Kelompok Tani Hutan (KTH), maupun koperasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) Tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan, KTH

merupakan sekumpulan petani yang berkewarganegaraan Indonesia yang mana mengelola usaha di bidang kehutanan baik di dalam maupun luar kawasan hutan. KTH memiliki berbagai fungsi, diantaranya sebagai peningkatan kapasitas SDM; pemecahan masalah; pengembangan usaha produktif, pengolahan, dan pemasaran; meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian hutan; dll.

KTH Wono Mulyo merupakan salah satu KTH yang telah mendapat izin persetujuan pengelolaan hutan dalam program PS melalui skema kemitraan dengan PT. Inhutani V sejak akhir tahun 2022 lalu yang beranggotakan 48 orang. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), lokasi kemitraan kehutanan memiliki luas $\pm 47,70$ hektare yang berada pada kawasan Hutan Produksi Tetap Register 18 Titi Bungur, Pesawaran.

Berdasarkan hasil pra riset yang telah dilakukan oleh peneliti, pengimplementasian program PS di Register 18 merupakan salah satu solusi penyelesaian konflik tenurial yang terjadi antara pemerintah, pemegang izin, dan masyarakat yang menggarap lahan di kawasan Register 18. Saat ini, pemegang izin kelola lahan adalah PT. Inhutani V. Dalam memperkenalkan program PS ini ke masyarakat, PT. Inhutani V mengenalkan berbagai sistem penanaman dan jenis tanaman yang dapat meningkatkan pendapatan petani dengan tetap menjaga kelestarian kawasan hutan Register 18.

Dengan demikian, peneliti memilih Register 18 sebagai lokasi penelitian karena berdasarkan fenomena yang telah dijabarkan bahwa Register 18 dahulu pernah mengalami konflik tenurial yang mana kawasan tersebut diduduki oleh masyarakat petani yang menginginkan lahan milik negara, yang mana kemudian solusi dari konflik tersebut yaitu dengan diimplementasikannya program PS, sehingga peneliti ingin melihat bagaimana implementasi pemberdayaan ekonomi melalui program PS di Register 18, khususnya pada KTH Wono Mulyo.

Berdasarkan uraian yang sudah dijabarkan tersebut, peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul “**Implementasi Program Pemberdayaan**

Ekonomi Perhutanan Sosial Pada Kelompok Tani Hutan Wono Mulyo (Studi di Register 18, Titi Bungur, Pesawaran)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi program pemberdayaan ekonomi perhutanan sosial pada KTH Wono Mulyo?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi program pemberdayaan ekonomi perhutanan sosial pada KTH Wono Mulyo.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu:

1. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran yang positif yang dapat memperkaya dan memperluas pengetahuan, khususnya untuk studi Ilmu Administrasi Negara yang mana berkaitan dengan implementasi pemberdayaan ekonomi melalui perhutanan sosial.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan serta evaluasi bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Lampung, khususnya yang terkait seperti Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, KPH Pesawaran, dan PT. Inhutani V Unit Lampung. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan bagi mahasiswa lain maupun masyarakat umum.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti memakai penelitian terdahulu sebagai rujukan dalam melaksanakan penelitian. Dengan demikian, peneliti dapat memperkaya teori yang mana bermanfaat dalam menelaah penelitian yang dilaksanakan. Berikut terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Limitasi
1	Setio Adiningsih P, dkk (2020)	Perhutanan Sosial dalam Mendukung Pemberdayaan Masyarakat dari Perspektif Ekonomi Pertahanan (Studi pada Desa Pantai Bakti Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhutanan sosial memberikan dukungan dalam pemberdayaan masyarakat dengan meningkatnya modal finansial, fisik, SDM, kelembagaan dan pengelolaan SDA.	Penelitian ini melakukan analisis pelaksanaan perhutanan sosial dalam mendukung pemberdayaan masyarakat serta melihat faktor pendukung dan penghambatnya.

2	Emi Roslinda, dkk (2021)	Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Pada Program Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Sanggau.	Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di kawasan HKm di Kab. Sanggau difasilitasi oleh pihak pemerintah mulai dari pusat sampai desa serta LSM yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya hutan serta meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat. Fasilitas yang diberikan berupa pembentukan usaha.	Penelitian ini menguraikan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan di beberapa izin HKm yang terdapat di Kabupaten Sanggau dan mengetahui bagaimana penilaian masyarakat terhadap program pemberdayaan yang telah dilaksanakan.
3	Ari Rakatama & Ram Pandit (2020)	Reviewing Social Forestry Schemes in Indonesia: Opportunities and Challenges	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ditemukan kinerja skema perhutanan sosial yang heterogen di tiga wilayah Indonesia – Sumatra dan Kalimantan; Jawa; dan Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara. Peluang ekonomi merupakan manfaat utama penerapan perhutanan sosial, sementara tantangan sosial dan lingkungan tampaknya menjadi hambatan utama penerapannya.	Penelitian ini mengkaji literatur Indonesia mengenai peluang serta tantangan berbagai skema dalam PS dan mengidentifikasi pembelajaran yang dapat diambil untuk mendorong skema PS dari berbagai sudut pandang.
4	James T. Erbaugh (2020)	Responsibilization and Social Forestry in Indonesia	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab kelompok pengguna pengelolaan hutan	Penelitian ini melakukan analisis PS di Indonesia yang mana sebagai proses

			menimbulkan tiga ketegangan penting. Pertama, tujuan kesejahteraan tidak selalu selaras dan menghasilkan <i>trade-off</i> penting terkait pemberdayaan masyarakat. Kedua, inisiatif perhutanan sosial nampaknya bersifat opsional, namun tidak memiliki akses bebas dan saluran formal untuk menantang keputusan negara. Ketiga, saat ini terdapat asimetris antara sumber daya yang digunakan untuk menyetujui izin perhutanan sosial dengan peningkatan kapasitas, pemantauan, dan evaluasi hasil pengelolaan. Ketiga ketegangan ini memberikan wawasan bagi perhutanan sosial di salah satu negara dengan hutan tropis terbesar di dunia, dan menunjukkan potensi upaya di masa depan dalam memajukan ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan dan tanggung jawab sumber daya alam.	tanggungjawab yang memberikan gambaran mengenai bagaimana PS dilakukan, apakah keselarasan antara kesejahteraan dan manfaat masyarakat valid, serta ketegangan yang terjadi selama tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan hutan.
5	M. Ali K. S dkk (2020)	The Boom of Social Forestry Policy and The Bust of Social Forest in Indonesia: Developing and Applying an	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses perhutanan sosial menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh menghasilkan dan menggunakan informasi, mendapatkan legitimasi	Penelitian ini mengkaji proses penerapan kebijakan PS dengan mempertimbangkan siapa yang diuntungkan dan

Access- exclusion Framework to Assess Policy Outcomes.	politik, dan menggunakan sumber daya hutan untuk keuntungan ekonomi dan lingkungan.	yang dirugikan dalam tahapan kebijakan yang berbeda.
--	---	---

Sumber: Diolah peneliti, 2023

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah diterangkan di atas, kebaruan dalam penelitian ini dapat dilihat dari beberapa poin. Pertama, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian lain, yang mana dalam penelitian ini membahas mengenai implementasi program pemberdayaan ekonomi perhutanan sosial yang cenderung fokus kepada pemberdayaan ekonominya yang mana saat ini masih cukup jarang yang membahas mengenai bagaimana pemberdayaan ekonomi perhutanan sosial. Kedua, penelitian terdahulu cenderung dilaksanakan di level Indonesia maupun kabupaten yang cakupan penelitiannya cukup luas, yang mana dalam penelitian ini berfokus pada Kelompok Tani Hutan (KTH) yang ada di Register 18, Titi Bungur, Pesawaran.

2.2 Implementasi Kebijakan Publik

2.2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dalam Pramono, J (2020), implementasi kebijakan didefinisikan sebagai segala perbuatan dalam berbagai ketetapan yang ada sebelumnya. Perbuatan ini meliputi berbagai macam usaha dalam mengubah sebuah ketetapan menjadi suatu tindakan yang operasional dengan jangka waktu yang ditentukan maupun dalam rangka untuk meneruskan segala kegiatan untuk memperoleh perubahan yang besar maupun kecil yang mana telah ditentukan oleh berbagai keputusan kebijakan yang dikerjakan oleh organisasi publik yang ditujukan guna memperoleh sasaran yang mana telah ditentukan sebelumnya.

Pada prinsipnya, implementasi kebijakan merupakan sebuah cara dalam suatu kebijakan maupun program untuk dapat mencapai tujuannya. Terdapat dua langkah

pilihan dalam menerapkan kebijakan publik, yaitu langsung diimplementasikan melalui sebuah program atau dapat melalui perumusan kebijakan *derivate* atau yang dimaksud dengan turunan dari kebijakan tersebut.

2.2.2 Model Implementasi Kebijakan

Perkembangan pesat dialami dalam literatur implementasi. Pada tahun 1973, konsep tersebut dikenalkan oleh Pressman & Wildavsky, literatur implementasi sudah berkembang melalui tiga generasi. Generasi pertama terjadi antara awal 1970an sampai dengan 1980an, generasi kedua terjadi pada 1980an sampai dengan 1990an, serta generasi ketiga terjadi pada 1990an sampai dengan sekarang (Paudel dalam Aslinda, 2023). Berikut uraian mengenai berbagai generasi:

1. Generasi Pertama (*Top-down*)

Generasi pertama dimulai pada awal 1970an sampai dengan 1980an. Sudut pandang *top-down* atau pendekatan terprogram merupakan sebutan bagi implementasi kebijakan generasi pertama. Pendekatan ini dapat dikatakan sebagai pendekatan yang mana pemerintah mendominasi.

Generasi pertama dikenal dengan berbagai studi pendahuluan yang awalnya tidak berdasar pada teoritis. Pada prinsipnya, penelitian generasi ini mengiringi pendekatan model yang rasional, yaitu kebijakan menempatkan tujuan, sedangkan penelitian implementasi berkaitan dengan perhitungan mengenai apa yang menyebabkan pencapaian berbagai tujuan menjadi sukar. Terdapat berbagai teori implementasi dari *top-down*, salah satunya yaitu:

1. Model Van Meter dan Van Horn

Van Meter and Van Horn dalam Syahrudin (2019) mengenalkan sebuah pola dasar yang meliputi enam variabel yang mana memiliki keterkaitan antara kebijakan dengan kinerja terbentuk. Adapun variabel-variabelnya yaitu:

- 1) Standar dan sasaran kebijakan. Setiap kebijakan harus memiliki standar serta sasaran yang tersusun rapi agar sasaran yang ditetapkan dapat tercapai.
- 2) Sumber daya. Proses implementasi dalam meraih keberhasilannya memiliki ketergantungan dari kesanggupan dalam memanfaatkan serta mengendalikan sumber daya yang ada. Terdapat sumber daya yang paling utama dalam memastikan keberhasilan dari suatu proses implementasi yaitu manusia.
- 3) Komunikasi antar organisasi. Perhatian agen pelaksana berpusat pada organisasi formal dan informal yang memiliki keterlibatan dalam proses pengimplementasian suatu kebijakan. Hal tersebut sangat pokok dikarenakan corak para agen pelaksana mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan.
- 4) Karakteristik agen pelaksana/implementor. Koordinasi menjadi salah satu cara kerja yang kuat dalam mengimplementasi suatu kebijakan. Semakin baik koordinasi serta arus komunikasi yang dilakukan oleh berbagai pihak yang terlibat, maka akan semakin kecil kemungkinan terjadinya kesalahan yang mungkin saja dapat mendatangkan konflik dalam proses implementasi.
- 5) Kecenderungan (*disposition*) pelaksana/implementor. Perilaku agen pelaksana dalam penerimaan maupun penolakan sangat dapat memengaruhi keberhasilan maupun tidaknya sebuah kinerja implementasi kebijakan.
- 6) Kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Hal ini bersangkutan dengan sejauh mana ketiga faktor tersebut mendorong terjadinya keberhasilan kebijakan yang mana sesuai dengan yang sudah ditentukan.

Terdapat kritik dalam generasi pertama atau perspektif *top-down*, yaitu:

- a. Implementasi hanya dilihat sebagai sebuah proses administratif dan tidak mengindahkan atau menghilangkan aspek politik. Realitasnya, bahasa kebijakan acap kali multi-tujuan, kurang jelas, serta multi-tafsir.
- b. Penekanan khusus pada penyusun anggaran dasar suatu organisasi, aktor kunci merupakan pembuat kebijakan, sedangkan pelaksana kebijakan patut diawasi dengan cermat.
- c. Pendekatan ini tidak memedulikan realitas perubahan kebijakan atau penyimpangan di tangan para implementor.

Munculnya berbagai kritikan tersebut mengarah pada hadirnya perspektif *bottom-up*.

2. Generasi Kedua (*Bottom-up*)

Pada tahun 1980an – 1990an generasi kedua dimulai, sudut pandang ini kerap kali disebut sebagai pemetaan ke belakang (*backward mapping*) atau pendekatan yang adaptif. Sudut pandang ini memiliki argumentasi bahwa implementasi yang berhasil guna memerlukan sebuah proses yang memungkinkan adanya penyesuaian kebijakan yang selaras dengan batas jangkauan hubungan antara kebijakan dengan latar kelembagaannya. Peran *street level* birokrat dan kelompok sasaran menjadi pusat perhatian dalam sudut pandang ini.

Pendekatan ini meyakini bahwa implementasi dapat tercapai jika kelompok sasaran diikutsertakan dari awal proses sampai pada pengimplementasian sebuah kebijakan. Terdapat beberapa model dalam pendekatan *bottom-up*, yaitu salah satunya adalah model proses alur dari Smith. Menurut Smith (1973) dalam Aslinda (2023:129), implementasi dipandang sebagai sebuah alur atau proses. Proses implementasi dalam model ini memandang melalui perspektif perubahan sosial dan politik, yang mana kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah memiliki tujuan untuk mengadakan perubahan dan pembetulan dalam lingkup masyarakat

yang mana merupakan sebagai kelompok sasaran (target group). Implementasi dalam model dipengaruhi oleh empat variabel, antara lain:

1. *Idealized policy* (kebijakan yang diidealkan): merupakan pola interaksi yang telah diatur dalam kebijakan yang bertujuan untuk mendorong dan memengaruhi kelompok sasaran untuk menjalankan sebuah kebijakan maupun program.
2. *Target groups* (kelompok sasaran): merupakan kelompok yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya suatu kebijakan yang diharapkan dapat mengadopsi berbagai pola interaksi yang diinginkan oleh perumus kebijakan.
3. *Implementing organization* (organisasi pelaksana): merupakan berbagai macam badan pelaksana yang bertanggung jawab dalam pengimplementasian sebuah kebijakan atau program.
4. *Environmental factors* (faktor lingkungan): Berbagai unsur yang ada pada lingkungan yang mana memengaruhi implementasi kebijakan, yaitu seperti aspek ekonomi, budaya, sosial, atau politik.

Perspektif *bottom-up* rupanya tidak menyiapkan solusi yang dapat memberikan kepuasan berkaitan dengan berbagai persoalan kebijakan publik. Penolakan atas kekuasaan pembuat kebijakan dipersoalkan karena tidak mempunyai akar dalam teori demokrasi yang standar. Kontrol kebijakan berdasar pada teori demokrasi harus dilakukan oleh berbagai aktor yang mana mendapat kuasa dari para pemilih. Dari basis kekuasaan seperti ini, otoritas pelayanan lokal tidak muncul (Paudel dalam Aslinda, 2023).

3. Generasi Ketiga (Sintesis Hibrid)

Menurut O'Toole dalam Aslinda (2023), generasi pertama maupun kedua tidak berhasil dalam mengadakan suatu sintesis yang luas dan lengkap dalam sebuah pendekatan yang dapat diintegrasikan terhadap analisis implementasi. Penelitian

baik *bottom-up* maupun *top-down* condong tidak memedulikan sifat jaringan dari implementasi kebijakan.

Perdebatan antara pandangan *top-down* dan *bottom-up* menuju pada berbagai usaha untuk dapat mensintesis sebuah pendekatan. Pendekatan sintesis ini memiliki ide kunci dari tiap pendekatan. Pendekatan sintesis dapat dipakai untuk mengetahui berbagai proses implementasi dengan lebih nyata.

Generasi ketiga menggabungkan dunia besar pembuat kebijakan dan dunia kecil individu implementor. Analisis besar (makro) melakukan aktivitas kerja pada level sistem, menegaskan kesamaan keadaan dari berbagai proses dan struktur organisasi. Analisis kecil (mikro) dalam pihak lain melakukan aktivitas kerja pada level individu, beranggapan bahwa perbuatan organisasi sebagai permasalahan yang belum dapat dipecahkan dan menjadi *outcomes* dari berbagai aktor otonom yang didorong oleh kepentingan personal. Salah satu model implementasi generasi ketiga yaitu:

1. Model Ripley dan Franklin

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti dalam Aslinda (2023), menuturkan bahwa terdapat tiga pandangan dalam model ini untuk mengukur keberhasilan implementasi, diantaranya:

- 1) Tingkat ketaatan pada ketentuan berlaku (*compliance perspective*), yaitu mengkaji definisi sempit keberhasilan implementasi yang mana melihat seberapa taat pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan yang tercantum dalam dokumen kebijakan, seperti peraturan pemerintah, program, atau undang-undang.

Berdasarkan pendekatan ini, keberhasilan dalam suatu kebijakan ditetapkan oleh tahap implementasi dan keberhasilan proses implementasi yang ditetapkan oleh kemampuan implementor, yaitu:

- a. Kepatuhan pelaksana dalam menaati arahan yang diberikan oleh atasan, dan

- b. Kapasitas pelaksana untuk melaksanakan apa yang dianggap benar sebagai pilihan pribadi dalam menghadapi berbagai pengaruh dari luar dan faktor non-organisasional, ataupun pendekatan faktual.
- 2) Lancarnya proses rutinitas fungsi artinya bahwa keberhasilan dari sebuah implementasi dibuktikan dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak munculnya permasalahan yang dijumpai. Program yang dibentuk oleh pemerintah dapat disebutkan berhasil jika prosesnya selaras dengan petunjuk dan ketentuan yang dibentuk yang mana meliputi cara pelaksanaannya, agen pelaksana, kelompok sasaran, serta manfaat dari adanya program.
- 3) Sudah dilaksanakannya kinerja dan dampak yang diinginkan. Sebuah program dapat dikatakan berhasil jika mencapai dampak yang dikehendaki. Kesuksesan sebuah program dapat ditilik dari segi prosesnya, namun dapat juga tidak berhasil jika ditinjau dari dampak yang dikeluarkan, atau kebalikannya.

Berdasarkan beberapa model implementasi yang telah dijabarkan, dalam melakukan penelitian, peneliti memakai model implementasi dari Smith yaitu model proses alur. Alasan pemilihan teori ini dikarenakan peneliti merasa teori Smith dapat menjelaskan bagaimana proses pemberdayaan ekonomi melalui implementasi program perhutanan sosial melalui empat variabel, yaitu *idealized policy*, *target groups*, *implementing organization*, dan *environmental factors*. Dengan demikian, empat variabel tersebut menurut peneliti cocok untuk melihat dan menguraikan pemberdayaan ekonomi melalui implementasi program PS.

2.3 Pemberdayaan Ekonomi

2.3.1 Pengertian Pemberdayaan Ekonomi

Istilah pemberdayaan dapat ditafsirkan sebagai sebuah usaha dalam mewujudkan potensi yang mana masyarakat sudah miliki agar menjadi suatu sistem yang dapat mengatur dan menyusun diri mereka sendiri dengan mandiri. Bukan sebagai objek,

namun individu sebagai pelaku yang dapat membimbing dirinya sendiri ke arah yang lebih baik lagi (Fadjar, M, 2020). Dengan adanya pemberdayaan masyarakat, diharapkan masyarakat memiliki kemampuan dan keterampilan secara mandiri untuk dapat mengatasi berbagai permasalahan yang ada, seperti permasalahan pendidikan, sosial, ekonomi, dan sebagainya.

Pemberdayaan ekonomi rakyat menurut Ginandjar Kartasasmita dalam Fadjar, M (2020) merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk mengarahkan sumber daya untuk dapat membentangkan potensi ekonomi yang mana untuk menaikkan daya produksi rakyat, baik sumber daya manusia maupun alam yang ada di sekitarnya dan dapat ditingkatkan produktivitasnya. Selain itu, dalam Santoso, I. R. (2021), dijelaskan pada dasarnya ekonomi rakyat merupakan kegiatan yang dilakukan pada sektor yang nyata yang mana mampu menyerap berbagai potensi dan sumber daya yang ada dalam masyarakat yang mana hasilnya menuju pada kesejahteraan seluruh masyarakat.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan derajat sumber daya manusia dan alam yang ada di sekitarnya. Pemberdayaan ekonomi dalam konteks ini adalah sebagai penguatan masyarakat untuk memperoleh upah/gaji yang mencukupi, memperoleh informasi, keterampilan, dan wawasan, sehingga mendapat peningkatan hasil dan berusaha untuk mengembangkannya.

2.3.2 Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat

Lesnussa, J. U. (2019) mengutip UNICEF (2012) yang mana mengemukakan lima dimensi sebagai sebuah tolok ukur keberhasilan dalam pemberdayaan masyarakat. Kelima dimensi tersebut merupakan kategori analisis yang memiliki sifat dinamis, berhubungan satu sama lain secara sinergis, dan saling melengkapi serta menguatkan. Lima dimensi tersebut antara lain (Lesnussa, J. U., 2019):

1. Kesejahteraan: tingkat kesejahteraan masyarakat dalam dimensi ini diukur melalui kebutuhan dasar yang terpenuhi, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dll.

2. Akses: adanya kesetaraan dalam mengakses sumber daya dan faedah yang mana dihasilkan dari adanya sumber daya.
3. Kesadaran kritis: kesenjangan yang terjadi dalam hidup masyarakat bukan aturan alami yang sedang berlaku sejak kapan pun atau hanya memang keinginan dari Tuhan, melainkan memiliki sifat yang struktural sebagai sebuah akibat dari hadirnya diskriminasi yang telah melembaga. Dalam tingkat ini, kesadaran masyarakat bahwa adanya kesenjangan tersebut merupakan bentuk sosial yang harus diganti merupakan keberdayaan masyarakat.
4. Partisipasi: pada tingkat keberdayaan ini, masyarakat tersangkut dalam berbagai lembaga yang hadir didalamnya. Maksudnya, masyarakat ikut berjasa dalam rangkaian tindakan pengambilan keputusan sehingga kepentingan mereka dipedulikan.
5. Kontrol: dalam konteks ini, keberdayaan merupakan seluruh tingkatan masyarakat turut andil dalam memiliki kendali terhadap sumber daya yang tersedia di sekitarnya, yang mana maksudnya dengan sumber daya yang tersedia, seluruh tingkatan masyarakat dapat mencukupi berbagai haknya, tidak hanya sekumpulan kecil orang yang memiliki kekuasaan saja yang dapat merasakan dan memanfaatkan sumber daya, namun seluruh masyarakat.

2.4 Perhutanan Sosial

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, Perhutanan Sosial (PS) merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan kemitraan kehutanan.

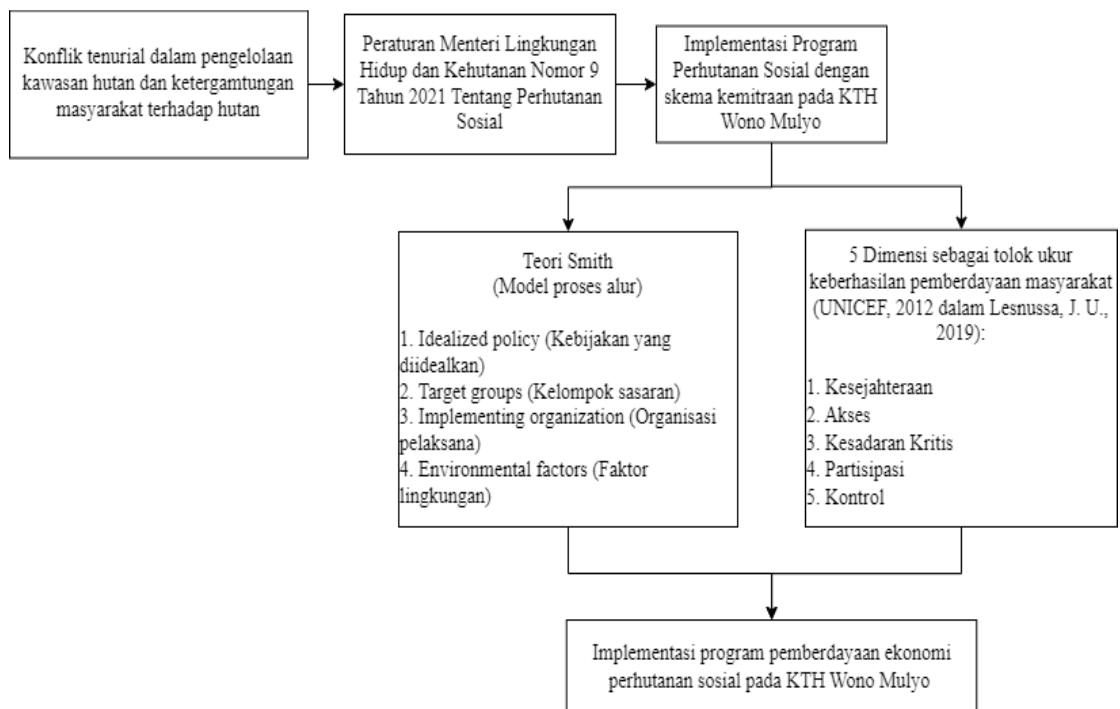
Terdapat beberapa skema yang diatur oleh Perhutanan Sosial, yaitu:

1. Hutan Desa (HD), merupakan hutan milik negara yang mana dalam prosesnya lembaga desa diberikan hak untuk mengelola. Hal ini memiliki tujuan agar suatu desa dapat sejahtera.
2. Hutan Kemasyarakatan (HKm), merupakan hutan yang dimiliki negara yang mana pengelolaannya dipercayakan kepada masyarakat. Tujuannya untuk memberdayakan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan sehingga terciptanya kesejahteraan masyarakat, penyelesaian konflik, dan pelestarian lingkungan.
3. Hutan Tanaman Rakyat (HTR), merupakan hutan produksi yang dibentuk dan dikelola oleh sekelompok masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas serta potensi dari hutan produksi yang mana diterapkan dengan Silvikultur agar kelestarian sumberdaya hutan tetap terjamin.
4. Hutan Adat (HA), dalam hal ini masyarakat memiliki hutan tersebut, yang mana sebelumnya merupakan hutan milik negara maupun bukan yang berada di lahan milik pribadi maupun masyarakat.
5. Kemitraan Kehutanan (KK), merupakan adanya kerja sama yang dilakukan antara masyarakat yang ada di sekitar hutan dengan pengelola hutan baik pemerintah maupun swasta dalam mengelola hutan negara.

2.5 Kerangka Pikir

Sejak tahun 2015 pemerintah telah mengeluarkan program Perhutanan Sosial yang mana memiliki tujuan agar kesejahteraan masyarakat meningkat khususnya yang menetap di sekitar kawasan hutan dengan menerapkan pola pemberdayaan. Pengimplementasian program perhutanan sosial di Hutan Produksi yang berada di Register 18 dilakukan dengan skema kemitraan yang mana Kelompok Tani Hutan (KTH) bermitra dengan PT. Inhutani V yang mana merupakan pemegang izin kelola lahan di Register 18.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat implementasi program perhutanan sosial yang ada di Register 18 khususnya pada KTH Wono Mulyo dari segi pemberdayaan ekonomi. Dengan demikian, peneliti menggunakan teori implementasi Smith yaitu model proses alur dan indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat yang diajukan oleh UNICEF karena peneliti menganggap bahwa dua teori tersebut yang paling relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Berikut kerangka pikir dalam penelitian ini:



Gambar 1 Kerangka Pikir

Sumber: Diolah peneliti, 2023

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini merupakan metode penelitian yang mana dapat menghasilkan data deskriptif baik memiliki bentuk kata maupun lisan dari orang ataupun reaksi yang dapat diperhatikan. Penelitian kualitatif berikhtiar untuk dapat mengungkap berbagai sifat maupun keistimewaan yang ada pada individu, kelompok, maupun organisasi dalam keseharian hidupnya dengan detail dan dapat dipertanggungjawabkan dengan cara ilmiah (Siyoto, S. & Sodik, A., 2015).

3.2 Fokus Penelitian

Adanya penetapan fokus pada penelitian kualitatif bertujuan untuk dapat memberikan batas dalam mengumpulkan data. Dengan demikian, peneliti dapat mengarahkan penelitian pada suatu persoalan yang mana menjadi maksud dalam penelitian ini. Adapun fokus dalam penelitian ini yaitu pada bagaimana pemberdayaan ekonomi Kelompok Tani Hutan (KTH) Wono Mulyo dalam pemberdayaan ekonomi tersebut melalui implementasi program Perhutanan Sosial (PS) di Register 18, Titi Bungur, Pesawaran. Penelitian ini menggunakan dua teori diantaranya adalah model implementasi kebijakan dari Smith dan lima dimensi pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh UNICEF.

Terdapat empat indikator dari model Smith yang diadopsi, berikut indikator yang digunakan yaitu:

1. Kebijakan yang diidealkan: pola interaksi yang dilakukan oleh KPH Pesawaran dan PT. Inhutani V dalam pengimplementasian program PS kepada KTH Wono Mulyo.
2. Kelompok sasaran:
 - a. Mengenai target sasaran dari program PS di Register 18, fokusnya ada pada KTH Wono Mulyo.
 - b. Manfaat yang dirasakan oleh KTH Wono Mulyo.
3. Implementasi organisasi:
 - a. Mengenai badan pelaksana atau unit birokrasi yang terlibat dalam mengimplementasikan program PS di Register 18
 - b. Kegiatan yang dilakukan atau diberikan oleh unit pelaksana.
4. Faktor lingkungan: mengenai faktor yang ada dalam lingkungan yang dipengaruhi baik secara langsung maupun tidak dari pengimplementasian program PS, khususnya pada aspek sosial budaya dan ekonomi.

Selain menggunakan model implementasi dari Smith, peneliti juga menggunakan lima dimensi yang mana dijadikan tolok ukur untuk keberhasilan pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh UNICEF, diantaranya yaitu:

1. Kesejahteraan: mengenai peningkatan kesejahteraan KTH Wono Mulyo dalam melakukan aktivitas penggarapan lahan di Register 18, khususnya pada peningkatan ekonomi dengan menggarap lahan di Register 18.
2. Akses: mengenai akses KTH Wono Mulyo terhadap lahan yang digarap KTH di kawasan Register 18.
3. Kesadaran kritis: kesadaran dalam meningkatkan tingkat produktivitas dari lahan dan tanaman yang dikelola.
4. Partisipasi: mengenai partisipasi KTH Wono Mulyo dalam tiap proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh unit pelaksana.

5. Kontrol: mengenai kemampuan KTH Wono Mulyo dalam mengontrol, mengelola, dan mengakses lahan yang digarap serta sumber daya yang dihasilkan dari lahan garapan.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Register 18 Titi Bungur, Pesawaran. Adapun alasan dipilihnya lokasi penelitian tersebut dikarenakan Register 18 dahulu pernah mengalami konflik tenurial yang mana kemudian PT. Inhutani V melakukan pengkondisian lahan dan selanjutnya diajukan untuk mengikuti program PS. Saat ini telah diberikan izin kelola lahannya kepada PT. Inhutani V sampai tahun 2039 dan telah menjalankan program Perhutanan Sosial (PS) dengan pola kemitraan dengan Kelompok Tani Hutan (KTH), sehingga KTH yang telah melakukan kemitraan dengan PT. Inhutani V dapat menggarap lahannya sendiri dengan tetap menjaga kelestarian serta mendapat berbagai manfaat maupun keuntungan dari kemitraan tersebut. Dengan demikian, peneliti ingin melihat bagaimana implementasi dari program Perhutanan Sosial dalam pemberdayaan ekonomi di sekitar kawasan hutan Register 18, khususnya pada KTH Wono Mulyo.

3.4 Waktu Penelitian

Berikut *timeline* mengenai jadwal penelitian yang dilaksanakan dari Desember 2023 – Mei 2024:

Tabel 2 Jadwal Penelitian

Jadwal	Waktu
Pengumpulan Data	Desember 2023
Pengolahan Data	Desember 2023 – Februari 2024
Seminar Hasil	Maret 2024
Komprehensif	Mei 2024

Sumber: Diolah peneliti, 2024

3.5 Sumber Data

Sumber data dibutuhkan guna menunjang terlaksananya penelitian. Data yang diperlukan peneliti dalam penelitian ini didapat dari dua sumber, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data ini didapat langsung dari sumbernya. Sumber data primer yaitu sumber data yang diserahkan secara langsung kepada peneliti yang mana merupakan pengumpul data (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini, sumber data primer didapat secara langsung dari pihak-pihak terkait, diantaranya PT. Inhutani V, KTH Wono Mulyo, dan KPH Pesawaran.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data ini didapat secara tidak langsung, melainkan dikumpulkan melalui berbagai sumber lain, misalnya melalui dokumen maupun orang lain (Sugiyono, 2013). Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui buku/*ebook*, jurnal, peraturan, artikel, laporan, dll.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk meraih data yang akurat dan rinci dibutuhkan teknik pengumpulan data yang dapat dilaksanakan dengan bermacam-macam *setting*, sumber, maupun cara (Sugiyono, 2013). Peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2013), wawancara adalah pertemuan yang dilakukan antara dua orang yang mana didalamnya terdapat proses penukaran informasi dan gagasan melalui tanya jawab atau diskusi, yang mana nantinya dapat disusun dan dihubungkan sebuah makna pada topik tertentu. Dengan melakukan wawancara, peneliti dapat memahami berbagai hal dengan terperinci perihal partisipan dalam menginterpretasikan sebuah situasi maupun fenomena yang terjadi. Adapun informan yang diwawancarai, yaitu ketua dan dua anggota KTH Wono Mulyo, Manager PT. Inhutani V di

Register 18, Kepala KPH Pesawaran, dan Penyuluh Kehutanan KPH Pesawaran.

Tabel 3 Daftar Informan

No	Informan	Informasi
1	Ibu Marjiyem selaku Manager PT. Inhutani V Register 18	Mengenai implementasi program PS dan pemberdayaan ekonomi pada KTH Wono Mulyo
2	Bapak Iskandar selaku Kepala KPH Pesawaran	Mengenai implementasi program PS dan pemberdayaan ekonomi pada KTH Wono Mulyo
3	Bapak Hazairin selaku Penyuluh Kehutanan KPH Pesawaran	Mengenai implementasi program PS dan pemberdayaan ekonomi pada KTH Wono Mulyo
4	Bapak Warsito selaku Ketua KTH Wono Mulyo	Mengenai implementasi program PS dan pemberdayaan ekonomi pada KTH Wono Mulyo
5	Bapak Kusno selaku Anggota KTH Wono Mulyo	Mengenai implementasi program PS dan pemberdayaan ekonomi pada KTH Wono Mulyo
6	Bapak Agus Riyanto selaku Anggota KTH Wono Mulyo	Mengenai implementasi program PS dan pemberdayaan ekonomi pada KTH Wono Mulyo

Sumber: Diolah peneliti, 2024

2. Observasi

Menurut Creswell dalam Sidiq, U., & Choiri, M. M (2019), observasi merupakan sebuah rangkaian tindakan yang dilakukan secara langsung oleh peneliti dalam menggali data dengan melaksanakan pengamatan secara detail terhadap manusia yang mana ditunjuk sebagai objek observasi dan lingkungannya sebagai tempat riset. Dalam penelitian ini, dilakukan pengamatan mengenai tanaman yang ditanam dan dikelola oleh KTH Wono Mulyo pada lahan garapannya di kawasan hutan Register 18.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah catatan kejadian lampau yang dapat berwujud seperti tulisan, gambar, maupun karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data berupa peraturan, undang-undang, surat keputusan, serta dokumen lain yang menyokong penelitian ini.

Tabel 4 Daftar Dokumentasi

No	Informasi
1	Surat Keputusan Perhutanan Sosial KTH Wono Mulyo
2	Profil Register 18
3	Berita Acara Pengukuran KTH Wono Mulyo

Sumber: Diolah peneliti, 2024

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam melakukan analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles & Huberman dalam Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J (2014), yaitu diantaranya:

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data mengarah kepada proses memilih, memusatkan, menjadikan sederhana, atau melakukan transformasi data yang ada pada hasil catatan lapangan, dokumen, transkrip wawancara, dan sebagainya. Dengan melaksanakan kondensasi, data yang ada menjadi lebih kuat.

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Setelah melaksanakan kondensasi data, maka hal selanjutnya yang akan dilakukan adalah menyajikan data, yang mana dalam penelitian kualitatif dapat dilaksanakan melalui berbagai wujud seperti, penjelasan singkat, hubungan antar kategori, bagan, dll. Miles & Huberman (1984) dalam hal ini menerangkan bahwa naskah yang bersifat naratif merupakan wujud yang sering kali dipakai untuk menyajikan data dalam kualitatif.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Tahap paling akhir dalam tahapan analisis data yaitu penarikan kesimpulan. Dalam tahap penelitian ini, peneliti melakukan pengambilan kesimpulan dengan mengambil inti sari dari berbagai rangkaian kategori hasil penelitian yang telah dilaksanakan yang mana berdasarkan wawancara, observasi, serta dokumentasi dari hasil penelitian.

3.8 Teknik Keabsahan Data

Temuan atau data dalam penelitian kualitatif dapat disebutkan sah jika tidak adanya perbedaan baik dari yang diberitahukan peneliti maupun apa yang sebetulnya terjadi pada objek yang diteliti (Sugiyono, 2013). Teknik pemeriksaan diperlukan untuk dapat menentukan keabsahan data. Penelitian ini menggunakan beberapa uji keabsahan data yang mencakup:

1. Derajat Kepercayaan (*Credibility*)

Derajat kepercayaan menunjukkan bahwa berbagai hasil dari penelitian dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan dengan melaksanakan pengecekan dalam berbagai macam sumber dengan menggunakan bermacam-macam cara. Dalam penelitian ini, untuk menguji kredibilitas peneliti memakai triangulasi sumber. Peneliti memakai triangulasi sumber yang mana dilakukan dengan cara memeriksa data yang telah didapat melalui beberapa sumber, dengan cara membandingkan hasil wawancara kepada sumber yang berbeda. Setelah dibandingkan, hasil tersebut dapat dideskripsikan dan dikategorikan berdasarkan pada perspektif yang sama, berbeda, ataupun spesifik.

2. Keteralihan (*Transferability*)

Transferability berhubungan dengan sampai mana hasil penelitian ini dapat dipraktikkan ataupun digunakan dalam keadaan lain. Tercapainya *transferability* jika orang lain atau pembaca dapat memahami hasil penelitian. Dengan demikian, penelitian harus dapat menyajikan laporannya dengan rinci, teratur, dan dapat dipercaya.

3. Kebergantungan (*Dependability*)

Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara mengecek keseluruhan proses dalam penelitian. Pengujian ini dilakukan oleh pembimbing yang mana melakukan audit secara keseluruhan dari proses penelitian.

4. Kepastian (*Confirmability*)

Pengujian ini dilakukan agar dapat terjamin kebenarannya. Untuk membuktikan kebenarannya dapat dilakukan melalui forum diskusi dengan melihat apakah hasil penelitian dapat dikatakan objektif atau tidak.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan mengenai Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Perhutanan Sosial Pada Kelompok Tani Hutan Wono Mulyo (Studi di Register 18 Titi Bungur, Pesawaran) dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Perhutanan Sosial Pada KTH Wono Mulyo jika ditinjau dengan model proses alur Smith yang terdiri dari 4 variabel yang saling mempengaruhi yaitu kebijakan yang ideal, kelompok sasaran, organisasi pelaksana, dan faktor lingkungan sudah terlaksana cukup baik meskipun terdapat hambatan dalam mengimplementasikan program PS kepada masyarakat selaku kelompok sasaran, yaitu adanya pro dan kontra akibat rasa takut dan trauma dari masyarakat akan dikembalikan lahan garapannya menjadi hutan sehingga mereka kehilangan sumber pendapatannya.
2. Pemberdayaan ekonomi KTH Wono Mulyo jika ditinjau melalui 5 dimensi keberhasilan pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh UNICEF, diantaranya kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi, dan kontrol. Dalam pelaksanaannya, kesadaran KTH mengenai produktivitas tanaman sudah meningkat, namun sampai saat ini belum adanya peningkatan ekonomi yang dirasakan oleh KTH dikarenakan oleh beberapa faktor, yaitu masih terfokusnya Inhutani terhadap penyelesaian konflik di Register 18, tanaman MPTS Alpukat sampai saat ini belum panen dan adanya perubahan iklim, serta serangan hama yang menyebabkan tanaman yang dikelola menjadi terhambat.

Adapun implikasi teori dalam penelitian ini yaitu penggunaan teori proses alur Smith yang digunakan dalam penelitian ini mengenai implementasi program PS dan untuk mendukung teori implementasi tersebut penelitian ini juga menggunakan 5 dimensi keberhasilan pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan UNICEF untuk melihat bagaimana pemberdayaan ekonomi pada KTH Wono Mulyo. Kemudian, keterbatasan dalam penelitian ini ada pada lingkup yang diteliti, yang mana hanya berfokus pada satu KTH, yaitu KTH Wono Mulyo untuk ditinjau bagaimana pemberdayaan ekonominya melalui implementasi program PS dengan menggunakan dua teori diantaranya model implementasi proses alur Smith dan 5 dimensi keberhasilan pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan UNICEF.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan dengan penelitian yang telah dilakukan, sebagai berikut:

1. KTH Wono Mulyo dapat melakukan inovasi dengan membuat produk turunan atau olahan dari hasil tanaman yang dikelola sehingga dapat meningkatkan nilai jual produk dari inovasi yang dilakukan.
2. PT. Inhutani V dan KTH Wono Mulyo dapat membentuk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) sebagai wadah untuk pengembangan usaha atau pemasaran dari hasil pemanfaatan kawasan hutan.
3. KTH Wono Mulyo wajib memberikan kontribusi dan memenuhi kewajibannya yang telah tertuang dalam SK Persetujuan PS setelah mendapat akses legalitas yaitu mengenai pembagian bagi hasil dengan PT. Inhutani V dan negara yang harus dibayarkan oleh KTH Wono Mulyo.
4. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat meneliti dan membahas mengenai strategi pemberdayaan ekonomi dalam program perhutanan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Absori, Nugroho, S. S., & Elviandri. (2017). Legalitas Perhutanan Sosial: Sebuah Harapan Menuju Kemakmuran Masyarakat Kawasan Hutan. *Yustisia Merdeka*, 3(2), 97-106.
- Amri, M. (2020). *Survei dan Indeks Perhutanan Sosial: Jalan Menuju Kesejahteraan Rakyat dan Kelestarian Hutan*. Jakarta: Katadata Insight Center.
- Aslinda. (2023). *Model Kebijakan Publik dan Teori Perubahan Kebijakan: Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit K-Media.
- Bashith, A. (2012). *Ekonomi Kemasyarakatan: Visi & Strategi Pemberdayaan Sektor Ekonomi Lemah*. Malang: UIN-Maliki Press.
- BPS. (2019). *Identifikasi dan Analisis Desa di Sekitar Kawasan Hutan Berbasis Spasial Tahun 2019*. In *Katalog 1105025*. Jakarta: BPS.
- Budiono, R., dkk. (2018). Dinamika Hegemoni Penguasaan Hutan di Indonesia. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 15(2), 113-126.
- Ekawati, S., dkk. (2020). *Bersama Membangun Perhutanan Sosial*. Bogor: Penerbit IPB Press.
- Erbaugh, J. T. (2019). Responsibilization and Social Forestry in Indonesia. *Forest Policy and Economics*, 109, 1-9.
- Fadjar, M. (2020). *Pemberdayaan Ekonomi, Stop Pernikahan Dini*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Futhuhin, A. A. (2023, Januari 20). *Perhutanan Sosial Mampu Dongkrak Ekonomi Warga*. Dipetik Oktober 2, 2023, dari rm.id: <https://rm.id/amp/baca-berita/government-action/157547/perhutanan-sosial-mampu-dongkrak-ekonomi-warga>.
- Hardiansyah, G., dkk. (2023). Upaya Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penanaman MPTS di Dusun Mianas Dalam Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) UNTAN. *Community Development Journal*, 4(4), 9505-9512.
- Haryani, R., & Rijanta, R. (2019). Ketergantungan Masyarakat Terhadap Hutan Lindung dalam Program Hutan Kemasyarakatan. *Jurnal Litbang Sukowati*, 2(2), 72-86.

- Hastanti, B. W., & Raharjo, S. A. (2021). Analisis Para Pihak Pada Implementasi Program Perhutanan Sosial Di KPH Telawa, Jawa Tengah. *Jurnal WASIAN*, 8(1), 11-23.
- Kadir, A. (2020). *Fenomena Kebijakan Publik dalam Perspektif Administrasi Publik di Indonesia*. Medan: CV. Dharma Persada Dharmasraya.
- Kansil, M. E., dkk. (2020). Implementasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Towuntu Timur Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(92).
- Lesnussa, J. U. (2019). Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat di Negeri Halong Baguala Ambon. *Jurnal Sosio Sains*, 5(2), 91-107.
- Lillah, Z., & Puspaningrum, D. (2020). Relasi Sosial Dalam Pengelolaan Lahan Rehabilitasi Taman Nasional Meru Betiri. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 13(1), 99-111.
- Mahardika, A., & Muyani, H. S. (2021). Analisis Legalitas Perhutanan Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Asahan. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)*, 1(1), 1-9.
- Mahmud, F. L. (2020). Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik (Studi Kasus Kebijakan Permukiman Di Provinsi DKI Jakarta). *Journal of Politic and Government Studies*, 9(2), 231-240.
- Meutia, I. F. (2017). *Analisis Kebijakan Publik*. Lampung: AURA.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook Edition 3*. USA: Sage Publications.
- Muhammad, N. (2017). Resistensi Masyarakat Urban dan Masyarakat Tradisional Dalam Menyikapi Perubahan Sosial. *Substansia*, 19(2), 149-168.
- Mulyana, & Moeis, J. P. (2022). Dampak Program Perhutanan Sosial Terhadap Pertumbuhan Usaha dan Deforestasi: Bukti Empiris dari Indonesia. *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan*, 11(1), 1-20.
- Murti, H. A. (2018). Perhutanan Sosial Bagi Akses Keadilan Masyarakat dan Pengurangan Kemiskinan. *Jurnal Analis Kebijakan*, 2(2), 62-75.
- Nugroho, R. (2018). *Kebijakan Publik: Implementasi dan Pengendalian Kebijakan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Nurfakhirah, A. A., Sentoso, R. S., & Hanani, R. (2021). Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengelolaan BUMDES Di Kabupaten Semarang (Studi Kasus BUMDES Mitra Sejahtera Desa Mendongan Kecamatan Sumowono). *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(2), 1-20.

- Oktaria, A. (2023, Januari 10). *8.000 Hektare Hutan di Lampung Diajukan Jadi Perhutanan Sosial*. Dipetik September 15, 2023, dari [lampost.co: https://m.lampost.co/berita-8-000-hektare-hutan-di-lampung-diajukan-jadi-perhutanan-sosial.html](https://m.lampost.co/berita-8-000-hektare-hutan-di-lampung-diajukan-jadi-perhutanan-sosial.html)
- Patras, Y. E., & Hidayat, R. (2019). Upaya Meningkatkan Kepercayaan Pada Organisasi Melalui Perbaikan Perilaku Pemimpin dan Keadilan Organisasi. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 26(2), 185-194.
- PermenLHK. (2018). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2018 Tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- PermenLHK. (2021). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perhutanan Sosial*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- Pesawarankab.go.id. (2023, 03 26). *Wilayah Geografis Pesawaran*. Dipetik 01 30, 2024, dari https://pesawarankab.go.id/Profil_Pesawaran/wilayahgeografis
- Petatematikindo.wordpress.com. (2016, 02 02). *Administrasi Kabupaten Pesawaran*. Dipetik 01 30, 2024, dari <https://petatematikindo.wordpress.com/2016/02/02/administrasi-kabupaten-pesawaran/>
- Pogaga, S. G., Kindangen, P., & Koleangan, R. A. (2020). Analisis Pengaruh Produktivitas Pertanian dan Pendidikan Terhadap Pendapatan Rumah Tangga di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 21(1), 54-70.
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: UNISRI Press.
- Puspitasari, S. A., dkk. (2019). Perhutanan Sosial Dalam Mendukung Pemberdayaan Masyarakat dari Perspektif Ekonomi Pertahanan (Studi Pada Desa Pantai Bakti Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi). *Jurnal Ekonomi Pertahanan*, 5(1), 121-142.
- Rakatama, A., & Pandit, R. (2020). Reviewing Social Forestry Schemes in Indonesia: Opportunities and Challenges. *Forest Policy and Economics*, 111, 1-13.
- Riyanto, M., & Kovalenko, V. (2023). Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2), 374-388.
- Roslinda, E., dkk. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Pada Program Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Sanggau. *Seminar Nasional Penerapan*

- Ilmu Pengetahuan dan Teknologi* (pp. 207-214). Pontianak: Universitas Tanjungpura.
- Sahide, M. A., dkk. (2020). The Boom of Social Forestry Policy and The Bust of Social Forests in Indonesia: Developing and Applying an Access-exclusion Framework to Assess Policy Outcomes. *Forest Policy and Economics*, 120, 1-18.
- Santoso, I. R. (2021). *Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (Memberdayakan Sektor Riil melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT)*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.
- Senoaji, G., dkk. (2019). Resolusi Konflik Tenurial Pemanfaatan Kawasan Hutan Di Hutan Lindung Rimbo Donok Kabupaten Kepahiyang. *J. Manusia & Lingkungan*, 26(1), 28-35.
- Setiyowati, E., dkk. (2016). Keberdayaan Masyarakat Desa Hutan dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). *Jurnal Pendidikan Nonformal*, XI(2), 105-111.
- Setkab. (2022, November 3). *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Presiden: Pendampingan Aspek Bisnis Perhutanan Sosial Harus Terintegrasi*. Dipetik September 15, 2023, dari Setkab.go.id: <https://setkab.go.id/pemberdayaan-ekonomi-masyarakat-presiden-pendampingan-aspek-bisnis-perhutanan-sosial-harus-terintegrasi/>
- Sidiq, U., & Choiri, M. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Susilo, Y. S., & Nairobi. (2019). Dampak Perhutanan Sosial Terhadap Pendapatan Masyarakat. *ISEI Economic Review*, III(1), 16-27.
- Syahrudin. (2019). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Tat, F. (2019). Kepentingan Kelompok Target Terhadap Kinerja Implementasi Kebijakan Kesehatan Ibu Dan Anak Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *CHMK Health Journal*, 3(3), 87-97.
- Taufiqurakhman. (2014). *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).

- Tejokusumo, B. (2014). Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial. *Geoedukasi*, 3(1), 38-43.
- Uceng, A., & dkk. (2019). Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Sumber Daya Manusia Di Desa Cemba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. *Jurnal MODERAT*, 5(2), 1-17.
- Wardani, Y. K., & dkk. (2023). Implementasi Sistem Agroforestri Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi dan Pencegahan Erosi Di Desa Teba Liokh Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (BUGUH)*, 3(1), 105-111.
- Watunglawar, B., & Leba, K. (2020). Kesejahteraan Sosial: Sebuah Perspektif Dialektis. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(1), 10-24.
- Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, 30(2), 129-153.
- Zulkaidhah, & dkk. (2023). Peningkatan Kualitas Bibit Tanaman Multy Purpose Tree Species (MPTs) Sebagai Upaya Mendukung Kegiatan Rehabilitasi. *Journal on Education*, 5(4), 11521-11527.